



SUHATRI BUR  
BUPATI PADANG PARIAMAN

RAHMANG  
WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

*tahun*  
**2023**



*Padang Pariaman*  
**berjaya!**

# KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menginformasikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang memuat aspek akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang berisi target dan realisasi dalam membelanjakan keuangan daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, dituangkan ke dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun 2023 sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yaitu "**Padang Pariaman Berjaya**".

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik sebagai informasi maupun sebagai evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.



**SUHATRI BUR, SE, MM**  
**BUPATI PADANG PARIAMAN**

Parit Malintang, 15 Maret 2024  
**BUPATI PADANG PARIAMAN**

  
**SUHATRI BUR**

# **PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**INSPEKTUR  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**



**HENDRA ASWARA, S.STP,MM.CGCAE**  
Pembina TK I NIP 19810926 199912 1 001

# **LAMPIRAN**



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Padang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
6. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

#### Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja.



## BAB II PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Pasal 3

IKU Perangkat Daerah untuk :

- a. perencanaan Jangka Menengah;
- b. perencanaan Tahunan dan Anggaran;
- c. penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

### Pasal 4

IKU di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

## BAB III KETENTUAN

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita DaPerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,  
  
SUSANTI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

  
RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 55

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 55 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	SKPD Pengelola
1.	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kebudayaan	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah (IKU)	<i>(Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang menghasilkan hafiz dan hafizah) / ("Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran" keseluruhan) x 100 %</i>	DISDIKBUD SETDA (KESRA), KECAMATAN	DISDIKBUD SETDA (KESRA), KECAMATAN
2.	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penegakan Perda (IKU)	<i>(Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan) / ("Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang di" laporkan dan dipantau) x 100 %</i>	SATPOL-PP DAMKAR	SATPOL-PP DAMKAR
3.	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IKU)	<i>(IPM Perempuan) / "IPM Laki-laki"</i>	DINSOS P3A	DINSOS P3A
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang (IKU)	<i>(Panjang jalan memenuhi kondisi jaringan jalan baik dan sedang) / ("Panjang jaringan " jalan kabupaten) x 100 %</i>	DINAS PUPR	DINAS PUPR
5.	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (IKU)	<i>(Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik) / "Luas irigasi Kabupaten" x 100 %</i>	DINAS PUPR	DINAS PUPR
6.	Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketepatan terhadap RTRW (IKU)	<i>(Realisasi RTRW) / ("Rencana Peruntukan) x 100 %</i>	DINAS PUPR	DINAS PUPR

7.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkeburuan terhadap PDRB (IKU)	Nilai PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan	BPS	DISTAN- KP, DISNAKESWAN
8.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (IKU)	$(\text{Nilai PDRB Sektor Perdagangan}) / (\text{Nilai PDRB Kabupaten}) \times 100 \%$	BPS	DISDAGNAKER KOP & UKM
9.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (IKU)	$(\text{Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan}) / (\text{Nilai PDRB Kabupaten}) \times 100 \%$	DPMPTP	DPMPTP
10.	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan (IKU)	$(\text{Jumlah Penduduk Miskin}) / (\text{Jumlah Penduduk seluruhnya}) \times 100 \%$	BPS	DINSOS P3A
11.	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita (IKU)	$(\text{Nilai PDRB}) / (\sum \text{penduduk}) \times 100 \%$	BPS	SEKRETARIAT DAERAH BAG. EKONOMI
12.	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IKU)	$\sum \text{UPLM} / (\text{ALM})^* \times 100^*$ UPLM = Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat UPLM 1 = Indeks Kepuasa Masyarakat Layanan Kepustakaan UPLM 2 = Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	DISKEARPUS	DISKEARPUS

			<p>UPLM 3 = Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat</p> <p>UPLM 4 = Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk</p> <p>UPLM 5 = Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan</p> <p>ALM = Aspek Literasi Masyarakat (jumlah UPLM)</p> <p>Lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang</p>			
13.	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah (IKU)			BPS	DISDIKBUD
14.	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (IKU)		$(\text{Jumlah Pengangguran}) / (\text{Jumlah angkatan kerja}) \times 100 \%$	BPS	DISDAGNAKER KOP & UKM
15.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan (IKU) Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB (IKU)	Penilaian opini Laporan Keuangan daerah oleh BPK		BPKD	SELURUH PERANGKAT DAERAH
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah / LPPD (IKU)	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten dari Kemenpan RB		BAGIAN ORGANISASI	SELURUH PERANGKAT DAERAH
16.	Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	Indeks E-Government / SPBE (IKU)	Nilai LPPD hasil penilaian Kemendagri		BAGIAN TPKS	SELURUH PERANGKAT DAERAH
17.	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IKU)	Indeks SPBE hasil Penilaian Kemenpan RB	Indeks Pelayanan Publik hasil penilaian Kemenpan RB	DISKOMINFO	DISKOMINFO
					BAGIAN ORGANISASI	SEKRETARIAT DAERAH

18.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup (IKU)	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya	BPS	DINKES/RSUD
19.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (IKU)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Tahun } n - \text{Jumlah Penduduk tahun } (n-1)}{\text{Jumlah Penduduk}}$	BPS	DPPKB
20.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (IKU)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan * / jumlah total rumah tangga * x 100 %	DPUPR	DPUPR
21	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana (IKU)	Jumlah Nagari tangguh bencana	BPBD	BPBD
22	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (IKU)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp)	DPMPPTP	DPMPPTP

BHPTI PADANG PARIAMAN,





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHATRI BUR  
Jabatan : Bupati Padang Pariaman

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Parit Malintang, 2 Februari 2023  
**BUPATI PADANG PARIAMAN**



**SUHATRI BUR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafzah	28%
2	Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda	67,5%
		Indeks Pembangunan Gender	94,00
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	69%
4	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	62,72%
5	Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	70%
6	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2.862.238,58 (Juta)
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	8,60%
		Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	13,30%
7	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	5,80%
8	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita	49,46 (Juta)
9	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,88
10	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah	14,12 Tahun
11	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,17%
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi KemenPAN RB	BB
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ LPPD	2,800 (Tinggi)
13	Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	Indeks E-Government /SPBE	2,76
14	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	4,57
15	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	69,29 Tahun
16	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	3,29%
17	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	92%
18	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	17 Nagari
19	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	445,4 Milyar



No	Program	Anggaran
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 4.635.094.690
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 465.113.100
3	Program Pelembagaan Pengurusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 56.300.000
4	Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 427.800.070
5	Program Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.700.000
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 69.999.950
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 74.484.676.608
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp 8.334.525.000
9	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 5.090.848.040
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 3.346.135.928
11	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 2.434.563.500
12	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 12.386.520.832
13	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 97.511.000
14	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 4.900.000
15	program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Rp 369.458.430
16	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 591.624.000
17	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 307.172.000
18	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 19.999.750
19	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 38.844.000
20	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 432.434.390
21	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 199.999.630

22	Program Pengembangan Ekspor	Rp	21.002.730
23	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	59.999.910
24	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	100.000.000
25	Program Pengawasan dan Pemeriksa Koperasi	Rp	37.185.000
26	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Rp	34.194.600
27	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	406.770.000
28	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	19.120.250
29	Program Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp	154.233.000
30	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	52.220.000
31	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	200.925.470
32	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp	130.479.000
33	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	50.000.000
34	Program Pengembangan UMKM	Rp	726.572.500
35	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	629.999.870
36	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	186.905.455
37	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp	30.903.050
38	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	109.323.415.382
39	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	98.842.850
40	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	12.282.200
41	Program Hubungan Industrial	Rp	92.115.888
42	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	173.617.985.900
43	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	4.182.879.885

44	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	915.946.440
45	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	318.976.915.839
46	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	762.811.100
47	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	447.614.750
48	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	258.436.000
49	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	247.409.200
50	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	36.000.000
51	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	750.180.500
52	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	38.114.000
53	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	28.600.000
54	Program Aplikasi Informatika	Rp	3.308.107.651
55	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	135.786.160
56	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	66.510.601.090
57	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	1.961.006.300
58	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Rp	450.336.000
59	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	1.764.511.660
60	Program Pengendalian Penduduk	Rp	354.799.000
61	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	3.843.044.400
62	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	2.141.731.700
63	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	3.651.177.200
64	Program Penanggulangan Bencana	Rp	31.243.701.200
65	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	27.005.000

66	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	30.004.000
67	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	127.855.360
68	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	566.700.000
69	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	7.140.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>842.557.798.408</b>

Parit Malintang, 2 Februari 2023  
BUPATI PADANG PARIAMAN



SUHATRI BUR



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHATRI BUR

Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Parit-Malintang, 05 Oktober 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	28%
2	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda	67,5%
		Indeks Pembangunan Gender	94,00
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	69%
4	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase ingasi kabupaten dalam kondisi baik	70%
5	Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	70%
6	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2.862.238,58 (Juta)
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,75%
		Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	13,30%
7	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	5,80%
8	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita	50,50 (Juta)
9	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,68
10	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah	14,12 Tahun
11	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,17%
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi KemenPAN RB	88
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ LPPD	3,300
13	Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	Indeks E-Government /SPBE	2,76
14	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	4,66
15	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	69,89 Tahun
16	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,70%
17	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	92%
18	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	17 Nagari
19	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	470,4 Milyar

No	Program	Anggaran
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 6,140,346,020
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 409,490,950
3	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 608,946,200
4	Program Perlindungan Perempuan	Rp 43,450,000
5	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 579,088,570
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 397,531,000
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 109,541,490
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 17,111,173,845
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp 2,158,120,282
10	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 12,722,329,422
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 748,150,027
12	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 1,166,057,560
13	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 12,624,460,000
14	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 21,459,000
15	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 8,042,200
16	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 369,458,430
17	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 565,697,625
18	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 79,000,000
19	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 10,000,000
20	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 8,000,000
21	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 311,905,000

22	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	29,195,000
23	Program Pengembangan Ekspor	Rp	10,000,000
24	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	47,862,300
25	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	99,999,090
26	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	29,335,000
27	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Rp	13,850,000
28	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	406,770,000
29	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	12,040,000
30	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	241,913,000
31	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	87,022,000
32	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	52,220,000
33	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	286,409,600
34	Program Penanganan Bencana	Rp	713,693,872
35	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	629,996,720
36	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	631,315,442
37	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp	37,929,805
38	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	82,736,705,756
39	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	299,964,950
40	Program Hubungan Industrial	Rp	57,648,000
41	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	2,382,133,500
42	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	3,601,802,000
43	Program Pengelolaan Barang Milk Daerah	Rp	885,944,800



44	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	427,595,737,845
45	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	701,023,100
46	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	444,607,000
47	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	1,435,400,000
48	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	621,563,480
49	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	145,500,000
50	Program Administrasi dan Tata Pemerintahan	Rp	162,873,500
51	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	997,385,000
52	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	38,114,000
53	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	28,600,000
54	Program Aplikasi Informatika	Rp	2,989,141,050
55	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	155,545,140
56	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	107,069,199,863
57	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	2,302,775,800
58	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Rp	402,195,500
59	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	1,230,160,000
60	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	11,520,065,082
61	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	5,360,884,901
62	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	2,085,559,900
63	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	3,676,637,660
64	Program Penanggulangan Bencana	Rp	1,325,791,400
65	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	25,240,500

66	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	29,870,000
67	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	112,583,766
68	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	566,700,000
69	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	6,100,000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>720,515,052,943</b>

  
BUPATI PADANG PARIAMAN,  
  
SUHATRI BUR

**Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2023  
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Kinerja		Program	Pagu		Anggaran		Keterangan
						Realisasi	%				Realisasi	%	
1	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh / Hafizah	28%	<i>(Jumlah Lembaga Pendidikan Agama yang menghasilkan Hafizh dan Hafizah) / (Jumlah Lembaga Pendidikan Agama) x 100 %</i>	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	43%	155%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 6.140.346.020,00	Rp 6.021.265.958,00	98,06%		
2	Peningkatan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegekan Perda	67,5%	<i>(Jumlah pelanggaran Perda dan Perda yang ditindak) / (Jumlah pelanggaran Perda dan Perda yang terjadi) x 100 %</i>	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	77,42%	114,70%	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 409.490.950,00	Rp 376.920.050,00	92,05%		
		Indeks Pembangunan Gender	94	<i>(IPM Perempuan) / (IPM Laki-laki)</i>	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	93,08	99,02%	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 608.946.200,00	Rp 540.752.961,00	88,80%		
								Program Perlindungan Perempuan	Rp 43.450.000,00	Rp 37.274.000,00	85,79%		
								Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 579.088.570,00	Rp 578.272.558,00	99,86%		
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 397.531.000,00	Rp 375.677.830,00	94,50%										
Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 109.541.490,00	Rp 104.974.808,00	95,83%										
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	69%	<i>Panjang jalan mencapai kondisi kategori Baik baik dan sedang (1/Total panjang "Jalan kabupaten") x 100 %</i>	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	65,63%	95,11%	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 17.111.173.845,00	Rp 14.842.352.205,00	86,74%		
4	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	70%	<i>(Jumlah irigasi baik) / (Jumlah irigasi Kabupaten) x 100 %</i>	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	68,50%	97,86	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp 2.158.120.282,00	Rp 1.780.248.967,00	82,49%		
5	Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	70%	(Realisasi RTRW)/(Rencana Pembentukan) x 100%	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	72,86%	104,08%	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 12.722.329.422,00	Rp 10.835.423.769,00	85,17%		
								Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 748.150.027,00	Rp 719.668.502,00	83,46%		
6	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	Rp. 2.862.238,58 (Juta)	Nilai PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	Rp. 2.745.289,91	95,91%	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 1.166.057.560,00	Rp 708.293.210,00	60,74%		
								Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 12.624.460.000,00	Rp 12.235.731.035,00	96,92%		
								Program Pengendalian dan Pengangulangan Bencana Pertanian	Rp 21.459.000,00	Rp 17.045.000,00	79,43%		
								Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 8.042.200,00	Rp 7.982.200,00	99,25%		
								Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 369.458.430,00	Rp 347.656.170,00	94,10%		
								Program Penyuluhan Pertanian	Rp 565.697.625,00	Rp 508.847.275,00	89,95%		
								Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 79.000.000,00	Rp 35.415.180,00	44,83%		
								Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 10.000.000,00	Rp 9.209.500,00	92,09%		
								Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 8.000.000,00	Rp 3.320.000,00	41,50%		
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	10,75%	<i>(Nilai PDRB Sektor Perdagangan) / (Nilai PDRB Kabupaten) x 100 %</i>	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	10,19%	94,79	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 311.905.000,00	Rp 287.920.530,00	92,31%		
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 29.195.000,00	Rp 19.470.586,00	66,69%										

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Kinerja		Program	Pagu	Anggaran		Keterangan
						Realisasi	%			Realisasi	%	
								Program Pengembangan Ekspor	Rp 10.000.000,00	Rp 6.910.000,00	69,10%	
								Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 47.862.300,00	Rp 46.144.000,00	96,41%	
								Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 99.999.090,00	Rp 94.821.768,00	94,82%	
								Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 29.335.000,00	Rp 29.223.500,00	99,62%	
								Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp 13.850.000,000	Rp 13.810.000,00	99,71%	
								Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp 406.770.000,00	Rp 397.864.300,00	97,81%	
								Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 12.040.000,00	Rp 12.000.000,00	99,67%	
								Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 241.913.000,00	Rp 232.458.727,00	96,09%	
		Kontribusi ekonomi Sektor Industri Pengelolaan Terhadap PDRB	13,3%	$\frac{\text{Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan} \times 100}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}}$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	10,48	78,80%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 52.220.000,00	Rp 39.766.169,00	76,15%	
7	Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	Tingkat Kemiskinan	5,80%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk Seluruhnya}} \times 100\%$	$\frac{(\text{target} - \text{realisasi})}{\text{target}} \times 100$	6,34%	90,69%	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 286.409.600,00	Rp 280.694.461,00	98%	
								Program Penanganan Bencana	Rp 713.693.872,00	Rp 673.085.600,00	94,31%	
8	Peningkatan Daya Beli Masyarakat	PDRB/Income Per Kapita	50,50 (Juta)	$\frac{\text{Nilai PDRB}}{\text{penduduk}} \times 1.000\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	55,54 (Juta)	109,98%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 629.996.720,00	Rp 556.217.594,00	88,29%	
9	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,88	$\frac{(\text{IPAL}) \times 100}{100}$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	67,75	358,84%	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 631.315.442,00	Rp 506.125.740,00	80,17%	
								Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 37.929.805,00	Rp 24.415.000,00	64,37%	
10	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	14,12 Tahun	$\frac{\text{jumlah siswa yang lulus}}{\text{jumlah siswa yang terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	14,19 Tahun	100,50%	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 82.736.705.756,00	Rp 75.988.353.509,00	91,84%	
11	Peningkatan Tenaga Kerja yang Terampil dan Berdaya Saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,17%	$\frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	$\frac{(\text{target} - \text{realisasi})}{\text{target}} \times 100$	6,69%	93,30%	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 299.964.950,00	Rp 297.322.350,00	99,12%	
								Program Hubungan Industrial	Rp 57.648.000,00	Rp 51.424.000,00	89,20%	
12	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	$\frac{\text{Pembelian opini Laporan Keuangan daerah: baik (BB)}}{\text{target}}$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	WTP	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 2.382.133.500,00	Rp 1.793.120.996,00	75,27%	
								Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 3.601.802.000,00	Rp 3.396.533.687,00	94,30%	
								Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 885.944.800,00	Rp 783.075.858,00	88,39%	
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemempaan RB	BB	$\frac{\text{Nilai SAKIP Kabupaten/Kota}}{\text{target}}$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	B	98,83%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 427.595.737.845,00	Rp 408.370.643.782,00	95,50%	
								Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 701.023.100,00	Rp 401.963.248,00	57,34%	
								Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 444.607.000,00	Rp 200.232.710,00	45,04%	
								Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 1.435.400.000,00	Rp 1.337.949.267,00	93,21%	

								Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 621.563.480,00	Rp 548.532.428,00	88,25%	
								Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 145.500.000,00	Rp 78.178.000,00	53,73%	
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD	3,300	Nilai LPPD hasil penilaian Kementerian	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	3,2904*	99,71%*	Program Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 162.673.500,00	Rp 133.699.921,00	82,19%	
13	Birokrasi yang Efisien dan Efektif (Kapabel)	Indeks E-Government/SPBE	2,76	Indeks SPBE Hasil Penilaian Kemenpan RB	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	2,62	94,93%	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 997.385.000,00	Rp 966.064.064,00	96,86%	
								Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 38.114.000,00	Rp 23.012.600,00	60,38%	
								Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 28.600.000,00	Rp 16.150.000,00	56,47%	
								Program Aplikasi Informatika	Rp 2.989.141.050,00	Rp 2.861.238.017,00	95,72%	
14	Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	4,66	Indeks Pelayanan Publik hasil Penilaian Kemenpan RB	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	3,88	84,90%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 155.545.140,00	Rp 91.879.125,00	59,07%	
15	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	69,89 Tahun	Angka usia harapan hidup yang menunjukkan tingkat kesehatan yang baik adalah mencapai umur 70 pada tahun tertentu. Selain angka harapan yang tinggi, di lingkungan masyarakat	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	69,70 Tahun	99,73%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 107.069.199.863,00	Rp 94.949.934.885,00	88,68%	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 2.302.775.800,00	Rp 1.878.326.156,00	81,57%	
								Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Rp 402.195.500,00	Rp 236.024.241,00	58,68%	
								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 1.230.160.000,00	Rp 945.489.622,00	76,86%	
16	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,70%	Jumlah Penduduk Tahun t - Jumlah penduduk tahun t-1 Jumlah Penduduk tahun t-1	$\frac{(t - \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	1,73%	98,23%	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 11.520.065.082,00	Rp 11.037.179.556,82	95,81%	
								Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 5.360.884.901,00	Rp 5.046.714.471,82	94,14%	
								Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 2.085.559.900,00	Rp 2.077.218.750,00	99,60%	
17	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	92%	Terdapat rumah tangga yang memperoleh akses terhadap air minum melalui SPAM yang persipaan dan bukit hingga persipaan 1) jumlah rumah tangga 1.00%	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	76,57%	83,29%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 3.676.637.660,00	Rp 3.171.727.169,00	86,27%	
18	Penguatan Layanan Kebencanaan	Nagari Tangguh Bencana	17 Nagari	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	16 Nagari	94,12%	Program Penanggulangan Bencana	Rp 1.325.791.400,00	Rp 1.086.471.201,00	81,95%	
19	Peningkatan Nilai Investasi di Padang Pariaman	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	470,4 Milyar	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp)	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	1.205 Milyar	256,16%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 25.240.500,00	Rp 7.100.000,00	28,13%	
								Program Promosi Penanaman Modal	Rp 29.870.000,00	Rp 25.643.645,00	85,85%	
								Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 112.583.766,00	Rp 46.109.128,00	40,95%	
								Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 556.700.000,00	Rp 512.880.500,00	92,13%	
								Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 6.100.000,00	Rp 1.780.000,00	29,18%	